



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN
SUB UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUS HERIANTO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 488419

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.480.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/240 m2 di KOTA JAMBI ,
HASIL SENDIRI Rp. 555.000.000
2. Tanah Seluas 400 m2 di KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp.
305.000.000
3. Tanah Seluas 400 m2 di KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp.
305.000.000
4. Tanah Seluas 406 m2 di KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp.
315.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 302.600.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO SOUL Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
4.800.000
2. MOTOR, YAMAHA 2DP NON ABS Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 22.800.000
3. MOBIL, HONDA JAZZGK51.5RSCVT (CKD) Tahun 2018, HASIL
SENDIRI Rp. 275.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 187.963.093

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.970.563.093

III. HUTANG Rp. 199.758.167

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

1.770.804.926

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **19 Juli 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.